

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan ekonomi merupakan perubahan sosial budaya. Pembangunan dengan demikian tidak dapat hanya dikonsepsikan sebagai tugas pemerintah saja, namun lebih banyak bergantung pada manusia dan struktur sosialnya dalam skenario “*innerwill*” atau proses emansipasi diri. Proses emansipasi ini selanjutnya mendasari partisipasi kreatif kolektif pencapaian kebutuhan dasar masyarakat (Bintoro, 1986).

Intisari dari proses pembangunan ekonomi dapat dijalankan secara berkesinambungan jika pelaku proses pembangunan mengetahui sasaran yang tepat. Menurut Bintoro (1986), masyarakat bangsa – bangsa dapat dikategorikan menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah masyarakat yang masih bersifat tradisional yang cenderung rendah pendapatannya, kedua adalah masyarakat yang bersifat peralihan (transisional) yang cenderung kurang stabil pendapatannya, dan yang ketiga adalah masyarakat maju (modern) yang cenderung tinggi tingkat pendapatannya. Kategori pertama dan ketiga merupakan kategori yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi yang berkeselimbangan (*equilibrium*), sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi kedua kategori ini lebih stabil. Sedangkan pada kategori masyarakat yang bersifat peralihan, permasalahan perekonomian sering muncul. Kondisi masyarakat yang demikian cenderung berada pada wilayah yang sedang berkembang. Sehingga kondisi masyarakat yang seperti mengakibatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan sulit untuk dicapai secara optimal. Oleh karena itu, kategori masyarakat transisional yang seperti ini membutuhkan perhatian lebih dari pelaku pemerintahan dalam wilayah masyarakat tersebut.

Pembangunan masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang bersifat transisional, seperti negara Indonesia, harus lebih difokuskan kembali kepada suatu sektor yang krusial di suatu negara. Jika konteks negara Indonesia yang dijadikan fokus pembangunan, maka sektor pertanian yang dijadikan sasaran utama proses pembangunan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan data BPS (2013) bahwa sekitar 40,83% penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian.

Yustika (2002) menyebutkan ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama, pertanian merupakan sektor yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan pangan masyarakat sehingga eksistensinya mutlak diperlukan. Kedua sektor pertanian ikut menyediakan bahan baku (*raw material*) bagi sektor industri (agroindustri) sehingga proses produksi aktivitas industri dapat terus berlangsung. Ketiga sektor pertanian turut memberi kontribusi meningkatkan besarnya devisa negara dengan komoditas yang dapat diekspor. Keempat, pertanian merupakan sektor yang menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan, 51 % dari seluruh angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian.

Dalam prosesnya, pembangunan pertanian membutuhkan sebuah poin inti yang berfungsi sebagai titik yang digunakan untuk menuju ke hasil yang akan dicapai. Salah satu poin inti yang dijadikan sebagai pusat proses pembangunan ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Suatu ciri pokok pendekatan kebutuhan dasar adalah tekanan pada pendekatan langsung dalam menangani masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar ( Hans, 2000 ).

Sebagai inti dari proses pembangunan ekonomi pertanian, pemenuhan kebutuhan dasar tidak semerta – merta dapat dilakukan dengan mudah dengan hanya mengandalkan pendapatan petani. Berbagai permasalahan yang kompleks muncul dalam berjalannya proses ini. Permasalahan klasik yang terus muncul di negara berkembang dalam proses pembangunan adalah permasalahan kemiskinan. Kian Wie ( 1981 ) menyatakan bahwa pendekatan kebutuhan dasar sebenarnya menggabungkan serta mensinteseikan tujuan – tujuan dari strategi – strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, pada kesempatan kerja, dan pada kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi pertanian dapat dilihat sebagai suatu proses dimana produksi barang – barang dan jasa - jasa kebutuhan dasar terus meningkat dengan mantap dan dimana diterapkan teknologi yang tepat guna.

Dalam menganalisis permasalahan kemiskinan diperlukan indikator yang sesuai, salah satunya adalah melalui indikator pendapatan. Seperti salah satunya adalah indikator pendapatan yang telah dikeluarkan oleh *World Bank*, yaitu \$1 per kapita. Akan tetapi, pendapatan belum dapat dijadikan tolak ukur yang sesuai. Hal ini dikarenakan petani tidak hanya menjadi produsen dalam usahatannya, namun sebagai konsumen. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik Indonesia menggunakan

pendekatan pengeluaran dalam mengukur kemiskinan di Indonesia. Sudarsono (1983) memaparkan bahwa salah satu indikator pengeluaran di Indonesia yaitu sektor pangan yang juga menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Indonesia, secara teoritis mampu bertambah jika pendapatan juga bertambah. Namun pada faktanya, pendapatan yang semakin tinggi juga mampu mengurangi tingkat konsumsi.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia pada sektor pertanian tidak akan lepas dari kategori kemiskinan yang sudah dikategorikan oleh Badan Pusat Statistik. Hal ini sangat diperlukan karena berbedanya perlakuan yang harus dilakukan untuk masyarakat yang latar belakang permasalahan kemiskinannya berbeda – beda. Menurut Badan Pusat Statistik (2014), terdapat 4 kategori kemiskinan, yaitu :

1. Rumah tangga miskin lainnya (hampir tidak miskin) (RTML) dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488.s/d. – Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687.- per orang per hari.
2. Hampir miskin (RTHM) dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per hari.
3. Miskin (RTM) dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.-kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari.
4. Sangat miskin (kronis) (RTSM) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya.

Dalam membahas konteks permasalahan kemiskinan petani di Indonesia, sasaran areal yang utama dalam pengembangannya adalah wilayah pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data dari BPS (2013) yang menyebutkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan dengan jumlah 2,24% untuk pedesaan dan 1,25% untuk perkotaan. Menurut Suharto (2009), kemiskinan petani di pedesaan sangat memungkinkan untuk terjadi. Ketertinggalan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan,produktifitas kurang, pendapatan, gizi, terbatasnya lapangan pekerjaan, sulitnya akses terhadap modal untuk meningkatkan

produktivitas ekonomi serta kesejahteraan hidup yang lemah merupakan beberapa penyebab utama adanya permasalahan kemiskinan petani di pedesaan ini.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki presentase sektor pertanian yang tinggi dari segi sumbangan terhadap PDRB adalah Kabupaten Lumajang. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menyumbangkan presentase PDRB terbesar di Kabupaten Lumajang dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Akan tetapi, sektor pertanian terus mengalami penurunan dalam peranannya di PDRB. Berbeda dengan sektor lainnya, seperti industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran. *Share* sektoral PDRB yang timpang ini menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, seperti kemiskinan.

Tabel 1. Peranan Sektoral PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 di Kabupaten Lumajang (%).

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2011</b>	<b>2012 *</b>	<b>2013 **</b>
Pertanian	34.56	33.62	32.67
Pertambangan dan Penggalian	1.83	1.77	1.74
Industri Pengolahan	13.46	13.50	13.56
Listrik, Gas & Air Bersih	0.57	0.57	0.57
Konstruksi	2.93	2.97	3.00
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	25.22	26.01	26.82
Pengangkutan & Komunikasi	4.42	4.47	4.49
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4.38	4.41	4.44
Jasa - Jasa	12.64	12.69	12.71
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Keterangan :

\* = Angka Diperbaiki \*\* = Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2014.

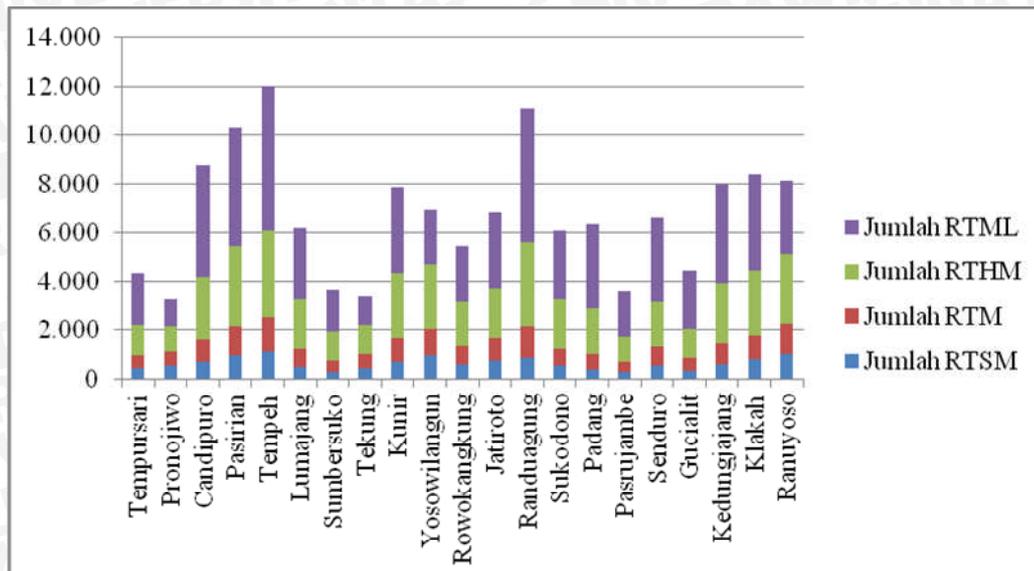
Menurut Kian Wie (1981), jika pola pertumbuhan ekonomi dicirikan oleh pertumbuhan pesat dari sektor – sektor yang padat-modal, seperti perkebunan besar, kehutanan, pertambangan, dan industri – industri besar, dan sektor – sektor yang padat karya tertinggal di belakang, maka tidak akan mengherankan jika pola pertumbuhan demikian akan menghasilkan pembagian pendapatan yang semakin timpang, terlebih jika sektor – sektor yang bertumbuh pesat tidak mampu untuk mendorong pertumbuhan sektor – sektor yang terbelakang dan mekanisme untuk redistribusi pendapatan (berupa sistem perpajakan yang progresif) tidak

bekerja dengan efektif dan efisien. Oleh karena itulah, sektor pertanian di ekonomi pedesaan sangat penting untuk dijadikan fokus pembangunan perekonomian.

Seiring berjalannya waktu, pembangunan perekonomian pedesaan pada sektor pertanian di Kabupaten Lumajang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang (2014), terdapat beberapa program dari pemerintah yang berfungsi untuk pembangunan pedesaan mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2014, diantaranya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam bentuk uang tunai, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dalam bentuk kartu BPJS, Beras Miskin (Beras Miskin) dalam bentuk potongan harga komoditi pangan beras dan beras sebesar 15 Kg, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam bentuk bantuan subsidi pupuk dan alat pertanian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bentuk sarana dan prasarana belajar mengajar, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam bentuk uang tunai dan seragam sekolah.

Selain itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang (2012) yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Lumajang, Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat merupakan salah satu fokus utama yang dijadikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Fokus ini, didasarkan terhadap isu – isu strategis yang saat ini masih dihadapi oleh pemerintahan Kabupaten Lumajang. Dan salah satu isu strategis yang berhubungan secara strategis dengan fokus kemiskinan adalah belum optimalnya pertumbuhan sektor pertanian.

Program – program pembangunan pertanian dalam fungsinya untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan tersebut kurang berjalan dengan baik. Kondisi ini dapat digambarkan melalui gambar 1 yang memaparkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang yang masih tinggi. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang kurang mendapatkan perhatian yang layak oleh pemerintah, hal ini ditandai dengan terpusatnya jumlah penduduk miskin yang tinggi pada satu kecamatan.



Gambar 1. Jumlah Rumah Tangga Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 menurut Klasifikasi dan Kecamatan di Kabupaten Lumajang

Keterangan :

RTML = Rumah tangga miskin lainnya RTHM = Rumah tangga hampir miskin

RTM= Rumah tangga miskin RTSM = Rumah tangga sangat miskin

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Lumajang, 2014

Salah satu kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi adalah Kecamatan Tempeh. Terdapat sekitar 12.010 rumah tangga miskin yang terdapat di daerah Kecamatan ini. Dengan klasifikasi yaitu 1.100 rumah tangga sangat miskin, 1.391 rumah tangga miskin, 3.587 rumah tangga hampir miskin, dan 5.932 rumah tangga miskin lainnya.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Pendataan Program Perlindungan Sosial Menurut Klasifikasi Kemiskinan dan Desa di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

Nama Desa	Jumlah				Total
	RTSM	RTM	RTHM	RTML	
Pandanarum	65	113	366	768	1312
Pandanwangi	51	93	259	443	846
Sumberjati	66	109	320	647	1142
Tempeh Kidul	79	126	352	516	1073
Lempeni	73	109	267	305	754
Tempeh Tengah	130	129	238	138	635
Kaliwungu	136	143	326	530	1135
Tempeh Lor	178	187	432	651	1448
Besuk	24	47	154	372	597
Jatisari	50	73	143	236	502

Nama Desa	Jumlah				Total
	RTSM	RTM	RTHM	RTML	
Pulo	110	84	209	390	793
Gesang	50	67	189	361	667
Jokarto	88	111	332	575	1106
Total	1100	1391	3587	5932	12010

Keterangan :

RTML = Rumah tangga miskin lainnya RTHM = Rumah tangga hampir miskin

RTM= Rumah tangga miskin RTSM = Rumah tangga sangat miskin

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Lumajang, 2014

Sedangkan desa yang memiliki jumlah masyarakat termiskin di Kecamatan Tempeh adalah Desa Tempeh Lor dengan jumlah masyarakat miskin yaitu 1.448 rumah tangga. Dengan klasifikasi yaitu, 178 rumah tangga sangat miskin, 187 rumah tangga miskin, 432 rumah tangga hampir miskin, dan 651 rumah tangga miskin lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Tempeh Lor merupakan desa yang memiliki jumlah rumah tangga miskin terbanyak di Kabupaten Lumajang.

Menurut BPS (2013), di Desa Tempeh Lor terdapat sekitar 1.536 rumah tangga yang bekerja di bidang pertanian. Desa Tempeh Lor berada pada urutan ketiga pada urutan kecamatan yang memiliki rumah tangga tani terbanyak di Kabupaten Lumajang selain Desa Kali PP dan Tempeh Kidul, yaitu masing - masing 2.245 rumah tangga dan 1.953 rumah tangga. Sehingga, fakta bahwa tingginya angka kemiskinan yang selaras dengan tingginya jumlah masyarakat yang bekerja di bidang pertanian di Kecamatan Tempeh, menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara kemiskinan dan pertanian.

Tabel 3. Statistik Tanaman Pangan Desa Tempeh Lor

Uraian	2011	2012	2013
Padi			
Luas Panen (000 ha)	7,68	9,21	8,25
Produksi (000 kw)	0,58	1,65	1,21
Jagung			
Luas Panen (000 ha)	5.89	6.39	5.16
Produksi (000 kw)	114,23	115,45	113,29
Ubi Kayu			
Luas Panen (000 ha)	0,29	0,85	0,65
Produksi (000 kw)	40,52	42,28	41,32
Ubi Jalar			

Uraian	2011	2012	2013
Luas Panen (000 ha)	0.082	0.12	0.096
Produksi (000 kw)	7.12	8.45	9.04
<b>Kacang Tanah</b>			
Luas Panen (000 ha)	0.45	0.39	0.26
Produksi (000 kw)	5.87	4.53	3.67
<b>Kedelai</b>			
Luas Panen (000 ha)	0.43	2.87	0.13
Produksi (000 kw)	4,12	5,85	2,18
<b>Kacang Hijau</b>			
Luas Panen (000 ha)	0.86	0.6	0.08
Produksi (000 kw)	0.66	0.44	0.08

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Benih Palawija Kecamatan Tempeh, 2014

Banyaknya rumah tangga yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian tidak sebanding dengan perkembangan luas panen dan produksi di Desa Tempeh Lor. Tabel 3 menunjukkan bahwa baik luas panen maupun produksi komoditi pangan yang ada di Desa Tempeh Lor, fluktuatif menurun. Rendahnya luas panen dan produksi ini menimbulkan permasalahan baru yaitu produktivitas yang rendah dan pendapatan petani juga menjadi semakin rendah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengambil judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Miskin di Pedesaan (Studi Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang)“. Sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani di pedesaan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Lumajang yang mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian adalah Kecamatan Tempeh. Di samping itu, Kecamatan Tempeh merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak di Kabupaten Lumajang, dengan jumlah mencapai 12.010 rumah tangga. Sedangkan untuk desa yang memiliki jumlah rumah tangga miskin terbanyak adalah Desa Tempeh Lor, dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 1.448 rumah tangga.

Berdasarkan Gambar 1 dan Tabel 3, tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Tempeh yang juga dibarengi dengan rendahnya produktivitas pertanian merupakan hal yang membuktikan bahwa sektor pertanian di pedesaan kurang mampu memberikan dorongan lebih terhadap peningkatan pendapatan petani miskin. Salah satu penyebab keterkaitan erat ini adalah tingkat penguasaan lahan yang rendah. Menurut Tambunan (2009), salah satu penyebab penguasaan lahan yang rendah adalah alih fungsi lahan pertanian dan distribusinya yang kurang merata. Secara umum, alih fungsi lahan pertanian terjadi dikarenakan kecenderungan pembangunan ekonomi modern yang menitikberatkan kepada industri dan sektor non pertanian. Sehingga, secara umum alih fungsi lahan pertanian mengacu kepada sektor industri.

Kondisi dimana sektor pertanian kurang mampu memberikan dorongan lebih terhadap pendapatan petani miskin ini dapat ditunjukkan dengan luasnya lahan pertanian di Desa Tempeh Lor pada tahun 2012, yang berjumlah sekitar 9.210 Ha, tidak selaras dengan luas lahan produksi dari semua komoditi yang dibutuhkan, yaitu sekitar 10.350 Ha (BPS Kabupaten Lumajang, 2013).

Tingkat penguasaan lahan petani yang rendah, juga menyebabkan pendapatan petani pada sektor *on farm* rendah. Dengan rendahnya pendapatan petani pada sektor pertanian, petani diharapkan mampu berpindah ke sektor formal. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan dengan mudah oleh petani karena keterbatasan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani di Desa Tempeh Lor. Menurut BPS (2013), jumlah masyarakat yang hanya menempuh sampai jenjang sekolah formal berjumlah sekitar 7.426 jiwa dari 21.126 populasinya.

Kondisi rendahnya tingkat pendapatan petani pada sektor *on farm*, tidak selalu membuat petani tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Dalam mencukupi kebutuhannya petani mampu untuk mencukupinya dengan mengelola secara mandiri hasil panen dari produksi pertaniannya. Hal ini ditunjukkan dengan data perbandingan penjualan hasil panen padi dan total hasil panen padi yang menunjukkan perbedaan di Desa Tempeh Lor. Menurut BPS Kecamatan Tempeh (2013), hasil panen padi dari semua petani padi di Desa Tempeh Lor adalah Rp. 2.564.789.968, sedangkan total hasil panen padi dalam rupiah adalah Rp. 1.986.783.400.

Tingkat pendapatan petani yang rendah dapat diukur dengan tingkat pengeluaran yang merujuk pada tingkat konsumsi petani. Menurut Sajogyo (1996), memakai data tingkat pendapatan dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga dinilai lebih tepat dalam mengukur kemiskinan. Hal ini dikarenakan: (a) dalam survei data ini dapat lebih tepat dilaporkan dibandingkan dengan angka pendapatan yang belum tentu masyarakat mampu mengungkapkannya secara jelas dan terperinci; (b) pengeluaran sudah mencakup penghasilan bukan uang, pemakaian tabungan masa lalu, pinjaman, pemberian barang modal yang dikonsumsi, (c) data dari BPS, mulai banyak tersedia (sampel besar).

Jika beras yang dijadikan konteks pengukuran pengeluaran petani, petani belum mampu mencukupi kebutuhannya secara penuh. Hal ini dikarenakan penjualan hasil panen padi adalah dalam bentuk gabah, tidak dalam bentuk beras. Sehingga petani harus membelanjakan sebagian dari pendapatannya untuk mendapatkan beras sebagai komoditi utama yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan, khususnya di Indonesia.

Dengan kondisi kebutuhan yang seperti ini serta kondisi bahwa pendapatan petani cenderung rendah sebagai akibat sempitnya penguasaan lahan, petani di Desa Tempeh Lor dirasa kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Sehingga pemerintah kabupaten Lumajang mencanangkan beberapa program dalam upaya pemenuhan kebutuhan petani. Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang (2014), beberapa program yang digunakan dalam meningkatkan taraf hidup petani miskin ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000, Beras Miskin (RASKIN) sebesar 15 Kg, dan Kartu BPJS. Menurut Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang(2014), bantuan ini kurang berjalan dengan baik dikarenakan bantuan yang dibagikan kurang tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penerima raskin yang terlalu sedikit di Desa Tempeh Lor, yaitu 865 rumah tangga, dibandingkan dengan jumlah warga miskin yang ada, yaitu 1448 rumah tangga

Berdasarkan uraian di atas, timbul beberapa pertanyaan yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian yang lebih spesifik dan mendalam. Dengan suatu penelitian yang menganalisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Petani di Pedesaan dengan studi kasus di Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pertanyaan tersebut adalah :

1. Apakah faktor tingkat pendidikan petani, tingkat konsumsi beras, luas penguasaan lahan, tingkat konsumsi non-beras, tingkat konsumsi non-pangan, dan pengaruh program raskin berpengaruh terhadap pendapatan petani miskin di Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimanakah strategi yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dalam usahanya kepada petani miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya di Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah :

1. Mengidentifikasi tingkat pendidikan petani, tingkat konsumsi beras, luas penguasaan lahan, tingkat konsumsi non-beras, tingkat konsumsi non-pangan, dan pengaruh program raskin dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani miskin di Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.
2. Memberikan saran strategi yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai upaya peningkatan taraf hidup petani miskin di Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian mengenai Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan petani miskin di pedesaan dengan studi kasus di Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut

1. Memberikan informasi bagi pemerintah Kabupaten Lumajang mengenai apa sajakah faktor – faktor yang paling menonjol dan paling berpengaruh terhadap pendapatan petani miskin di Kabupaten Lumajang.
2. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.